

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
RISIKO**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ANINDYARTA ADI WARDHANA
NIM. C2C009004**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anindyarta Adi Wardhana

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009004

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN RISIKO**

Dosen Pembimbing : Nur Cahyonowati, S.E, M.Si, Akt.

Semarang, 25 April 2013

Dosen Pembimbing,



(Nur Cahyonowati, S.E, M.Si, Akt)

NIP 19810813 200801 2007

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN




Nama Mahasiswa : Anindyarta Adi Wardhana
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009004
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN RISIKO**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 15 Mei 2013

Tim Penguji

1. Nur Cahyonowati, S.E, M.Si, Akt.
2. Dr. Endang Kiswara, M.Si, Akt.
3. Dr. Hj. Zulaikha, S.E, M.Si, Akt.

()
( 21/6-13)
()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anindyarta Adi Wardhana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 April 2013

Yang membuat pernyataan,



(Anindyarta Adi Wardhana)

NIM. C2C009004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.

(QS. 'Āli `Imrān: 150)

Good isn't enough when better is possible

(Mario Teguh)

If you can dream it, you can do it."

(Walt Disney)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Allah SWT atas karunia dan Ridho-Nya

Papa, Mama dan Kakakku tersayang

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of company characteristics such as ownership structure, independent nonexecutive director, audit committee independence, external auditor quality, firm size, leverage and industry type on the level of risk disclosure on all nonfinancial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. This study is a replication of the research that has been done by Oliviera et al. (2011). However, control variable which are listing status and accounting standard that were used by Oliviera et al. (2011), are not being used in this research, because the variable is not applied in Indonesia. Financial companies are not used because they have different regulations with nonfinancial companies.

This research is an empirical study with purposive sampling techniques in data collection with the following criterias: 1. Non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. 2. Completed annual reports published in 2011. The data obtained from annual report of 328 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. Data were analyzed by Partial Least Square.

The hypothesis in this research are as follows, 1. Concentrated ownership structure affects negatively on the level of risk disclosure, 2. Independent nonexecutive director affect positively on the level of risk disclosure, 3. Independent audit committees affect positively on the level of risk disclosure, 4. Big4 accounting firm engagement affect positively on the level of risk disclosures, 5. Leverage affects positively the level of risk disclosure, 6. Firm size affect positively on the level of risk disclosure, 7. High level of environmental sensitivity affect positively on the level of risk disclosure. The results from the test of hypothesis indicated that the size and quality of the company's external auditors are significantly influenced on the level of risk disclosure. Furthermore, the ownership structure, independent nonexecutive director, audit committee independence, leverage and industry type does not significantly influenced the level of risk disclosure. The result of this study provides information for investor about the risk that company could have, and also useful to give information for decision making.

Keywords: risk disclosure, firm characteristics, annual report

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan seperti struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit independen, kualitas auditor eksternal, ukuran perusahaan, *leverage* dan jenis industri terhadap tingkat pengungkapan risiko pada semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2011. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Oliviera *et al.* (2011). Namun, variabel kontrol yang digunakan Oliviera *et al.* (2011) yaitu *listing status* dan *accounting standard* tidak digunakan dalam penelitian ini, karena tidak berlaku di Indonesia. Perusahaan keuangan tidak digunakan karena memiliki regulasi yang berbeda dengan perusahaan nonkeuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan data dengan kriteria sebagai berikut : 1. Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011. 2. Menerbitkan *annual report* tahun 2011 dengan lengkap. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 328 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011. Analisis data dilakukan dengan *Partial Least Square*.

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 1. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko, 2. Dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko, 3. Komite audit independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko, 4. Perikatan dengan KAP Big4 berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko, 5. Terdapat pengaruh positif antara *leverage* dengan tingkat pengungkapan risiko, 6. Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko, 7. Tingkat sensitivitas lingkungan yang tinggi berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Selanjutnya, struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit independen, *leverage* dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada investor tentang risiko yang dihadapi perusahaan dan berguna untuk dasar pengambilan keputusan.

Kata kunci: pengungkapan risiko, karakteristik perusahaan, *annual report*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, taufiq, dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Nasir, M.Si., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Nur Cahyonowati, S.E, M.Si, Akt. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan serta konsultasi sehingga skripsi ini dapat selesai
4. Aditya Septiani S.E, M.Si, Akt. selaku dosen wali penulis yang telah memberi arahan dan nasihat selama ini

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama civitas akademika Universitas Diponegoro
7. Ayah dan Ibu penulis, Ir. Susanto dan Siti Sunaryati, B. Sc., yang selalu memberikan dorongan dan doa restu, serta kakakku Hayu Anindya Windriyati S.E. yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1.
8. PT. Pembangunan Perumahan (Persero) .Tbk yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1, serta memberikan bantuan finansial yang sangat berarti.
9. Soebagyo S.E yang senantiasa memberikan dukungan, inspirasi dan motivasi kepada penulis.
10. Rita Yuliana S yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.
11. Armania, Alvin Agus, Leditya, Abdurohman Muslim, Anggie Noor, Tito Albi, Mita Septiani, Dewi Fatmawati, Mayco Defrio, Fauziah Nurul Fadhillah, Andreas Widhi, Mona, Letsa dan teman-teman Akuntansi Undip 09 seperjuangan.

12. Teman-teman Tim II KKN Undip Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Ade, Fitria, Mayang, Nurmanto, Aditya, Khalim.
13. Teman-teman kost Ceria Selatan, Abdurrohman Muslim dan Imam Wahyu Ramadhan yang memberikan dukungan dan inspirasi.
14. Sahabat-sahabat penulis, Ricky Aris, Aristo Herbawono, Ramadyangga, Dhimas Bagus, Pindho Galang, Arifin Sudi, Yossy Erviana dan Raisa Nanda.
15. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan sehingga penulis sangat berterimakasih jika ada kritikan, saran, dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2013



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan	11
2.1.2 Risiko	14
2.1.3 Manajemen Risiko	15
2.1.4 Pengungkapan Risiko	16
2.1.5 Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko.....	19
2.1.5.1 Tingkat Pengungkapan Risiko	19
2.1.5.2 Struktur Kepemilikan.....	20

2.1.5.3 Dewan Komisaris Independen	20
2.1.5.4 Komite Audit Independen	21
2.1.5.5 Kualitas Auditor Eksternal	22
2.1.5.6 <i>Leverage</i>	23
2.1.5.7 Ukuran Perusahaan	24
2.1.5.8 Jenis Industri	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	27
2.4 Pengembangan Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.1.1 Variabel Dependen	37
3.1.2 Variabel Independen	40
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	44
3.5 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2 Analisis Data	48
4.3 Interpretasi	57
4.3.1 Hipotesis 1	57
4.3.2 Hipotesis 2	59
4.3.3 Hipotesis 3	61
4.3.4 Hipotesis 4	63
4.3.5 Hipotesis 5	64
4.3.6 Hipotesis 6	66
4.3.7 Hipotesis 7	68
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian	72

5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 <i>Item</i> Pengungkapan Risiko	38
Tabel 4.1 Hasil pemilihan Sampel.....	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 1	50
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 2.....	51
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 3.....	51
Tabel 4.5 Outer Weights (Mean, Stdev, T-values)	53
Tabel 4.6 R Square.....	54
Tabel 4.7 Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values).....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	29
Gambar 3.1 Model Konstruk PLS	47
Gambar 4.1 Output Bootsraping.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	76
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Dewasa ini, banyak tuntutan yang ditujukan kepada perusahaan untuk mengungkapkan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengungkapan merupakan salah satu cara untuk memberikan suatu transparansi kepada para *stakeholder*, dengan harapan asimetri informasi dapat dikurangi. Perusahaan juga diminta untuk lebih meningkatkan kualitas pengukuran dan pengungkapan yang telah dilakukan, agar *stakeholder* dapat memperoleh informasi yang relevan.

Laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang digunakan untuk melakukan pengungkapan. Laporan tahunan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik. Dalam peraturan nomor X.K.6 tentang LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-134/BL/2006 Tanggal : 7 Desember 2006, disebutkan bahwa emiten wajib menerbitkan laporan tahunan kepada Bapepam dalam bentuk asli. Laporan tahunan dalam bentuk asli yang dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris. Dokumen ini terdiri atas dua bagian yaitu, bagian keuangan dan non-keuangan. Keseluruhan informasi, baik dari sisi keuangan atau non-keuangan, yang diungkap dalam *annual report* bermanfaat sebagai pertimbangan *stakeholder* dalam mengambil keputusan mengenai investasi yaitu, dalam melakukan analisis risiko agar hasil pengembalian yang diharapkan dapat diterima, ataupun untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk melakukan pelunasan utang. Pengungkapan dalam bentuk angka keuangan saja dirasa kurang cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan kecurangan dalam pemerolehan angka tersebut, sehingga timbul suatu keraguan mengenai keandalan informasi keuangan yang disajikan. Untuk itu, diperlukan suatu pemberian informasi dengan tidak hanya menggunakan analisis keuangan saja, tetapi juga menggunakan analisis non-keuangan untuk memperkuat informasi yang telah diungkap di sisi keuangan. Salah satu pengungkapan yang sangat penting adalah pengungkapan risiko perusahaan.

Risiko menurut ICAEW adalah suatu kejadian yang tidak pasti, yang apabila terjadi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Linsley and Shrivess (2005) dan Amran *et al.* (2009) mengelompokkan risiko ke dalam 6 garis besar, yaitu *Financial Risk*, *Operation Risk*, *Empowerment Risk*, *Information Processing and Technology Risk*, *Integrity Risk* dan *Strategic Risk*. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perjalanan bisnis. Perusahaan harus selalu siap menghadapi segala risiko dengan cara menemukan solusi antisipatif untuk menghadapi segala kemungkinan yang kelak akan terjadi. Demi mewujudkan asas *going concern*, tentunya perusahaan harus melewati dan menyelesaikan segala tantangan yang ada dengan cara yang efektif dan efisien. Langkah-langkah antisipatif yang diterapkan oleh perusahaan penting untuk diketahui oleh *stakeholder*. Dengan adanya pengungkapan tersebut, *stakeholder* dapat mengukur seberapa siap perusahaan dalam menghadapi risiko.

Pengelolaan risiko merupakan cara yang harus diambil oleh perusahaan untuk mengurangi dampak yang mungkin dapat terjadi. Dengan pengelolaan risiko yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif serta tujuan yang direncanakan dapat dicapai.

Proses pengelolaan risiko sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan melalui pengungkapan risiko. Salah satu media yang sering digunakan adalah *annual report*. Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999 dalam Abraham dan Cox, 2007). Dengan adanya pengungkapan risiko yang baik, *stakeholder* dapat memperoleh dasar pertimbangan yang baik pula dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkap dalam bagian non-keuangan dianggap penting karena mampu memberikan informasi yang tidak dapat disajikan dalam sisi keuangan.

Pengungkapan resiko sendiri merupakan salah satu praktik *Good Corporate Governance*. Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance menyebutkan bahwa perlunya perusahaan untuk mengungkap informasi salah satunya adalah informasi manajemen resiko. Dalam pedoman ini juga diatur tentang wewenang struktur perusahaan dalam menangani resiko baik antisipasi, penanggulangan dan pengendaliannya.

Regulasi yang mendasari pengungkapan risiko di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai Kewajiban

Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa perusahaan harus menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya: risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah.

Peraturan lain yang mengatur tentang pengungkapan resiko adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/MBU/2002. Dalam pasal 22 ayat 2 (b) bahwa Dewan Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal dalam hal pengkajian dan pengelolaan resiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola resiko usaha relevan. Selain itu dalam pasal 28 ayat 2 (h) juga disebutkan bahwa perusahaan BUMN harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham/pemilik modal, kreditur, dan *stakeholders*, salah satunya faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko.

Selain peraturan-peraturan di atas, pengungkapan resiko juga diatur dalam ED PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Di dalam PSAK 60 disebutkan bahwa informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan harus diungkapkan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan

kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan untuk kuantitatif entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, menemukan adanya ketidakjelasan pengungkapan risiko. Penelitian di perusahaan-perusahaan yang *listing* di Italia dan Kanada bersifat sukarela, diungkap secara kualitatif dan fokus pada risiko yang dihadapi saat ini dan juga masa lalu, dibanding risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang (Beretta & Bozzolan, 2004; Lajili & Zéghal, 2005). Linsley dan Shrives (2006) menemukan bahwa pengungkapan risiko oleh perusahaan Inggris yang *listing* diungkap secara kualitatif, dan menyajikan forward-looking information di dalam pengungkapannya. Selain itu terdapat kesulitan dalam menentukan tingkat risiko perusahaan karena tidak ada standar pengungkapan risiko dalam laporan tahunan, dan juga pengungkapan risiko dicantumkan di berbagai bagian dalam *annual report* secara menyebar (Linsley & Shrives, 2006).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, fokus pada pengungkapan sukarela pada internal audit (Deumes & Knechel, 2008); Pengungkapan sukarela pada laporan tahunan (Beretta & Bozzolan, 2004); dan pengungkapan risiko dalam pengungkapan mandatory maupun voluntary (Abraham & Cox, 2007; Amran *et al.*, 2009; Hassan, 2009; Linsley & Shrives, 2006).

Dengan hasil penelitian yang berbeda-beda, serta pentingnya pengungkapan resiko dilakukan di Indonesia, mendorong penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan nonkeuangan dipilih, karena perusahaan pada sektor keuangan memiliki karakteristik pelaporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan nonkeuangan (Alsaeed, 2006). Perusahaan nonkeuangan tidak memiliki akun persediaan dan karakteristik akun piutang berbeda. Dalam *annual report*, perusahaan keuangan wajib mencantumkan keberadaan komite manajemen risiko sedangkan perusahaan nonkeuangan hanya dihimbau untuk mencantumkan. Perusahaan keuangan memiliki aturan yang lebih ketat mengenai pengungkapan risiko, misalnya peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum, sementara itu perusahaan kategori keuangan seperti bank termasuk dalam industri *low profile* yang akan mengungkap informasi risiko lebih sedikit (Taures, 2011). Untuk tahun penelitian, akan dilakukan pada tahun 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Dalam menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan risiko, Abraham dan Cox (2007) menemukan hubungan negatif dan positif, sedangkan Oliviera *et al.* (2011) tidak menemukan hubungan sama sekali. Di bagian lain, dari perspektif teori agensi, kreditor dari perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki insentif yang

besar untuk mendorong perusahaan agar mengungkapkan informasi lebih banyak. Namun, dalam penelitian yang banyak dilakukan, justru tidak menemukan hubungan yang signifikan antara tingkat *leverage* dengan tingkat pengungkapan risiko (Abraham and Cox, 2007; Amran *et al.*, 2009; Linsley and Shrives, 2006).

Di Indonesia, pengungkapan risiko belum memiliki standar khusus untuk mengukur tingkat pengungkapan risiko yang baik. Padahal, pengungkapan risiko dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *stakeholder*.

Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil, serta belum adanya standar yang mengatur pengungkapan risiko, mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dengan objek perusahaan nonkeuangan yang *listing* di Indonesia. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko?
3. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko?
4. Apakah kualitas auditor eksternal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko?

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko?
7. Apakah sensitivitas lingkungan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan dewan komisaris independen dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan komite audit independen dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan kualitas auditor eksternal dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan *leverage* dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.
7. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan tingkat sensitivitas lingkungan dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dalam pengungkapan risiko pada *annual report* perusahaan. Dan juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang praktik pengungkapan risiko.

2. Bagi Pengguna Informasi Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan kepada perusahaan yang melakukan pelaporan risiko.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka

Bab ini terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Bab IV Hasil dan Analisis

Bab keempat ini mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

Bab V Penutup

Bab terakhir yang terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Agency theory menjelaskan bahwa organisasi merupakan jaringan hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik, kreditur dan pihak lain (*principal*). Di dalam teori ini, agen diasumsikan sebagai individu yang rasional, memiliki kepentingan pribadi dan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Manajer sebagai agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Agency Theory dibangun berdasarkan hubungan yang terjadi dalam hubungan keagenan (*agency relationship*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency relationship* sebagai

“a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan merupakan hubungan yang timbul dari adanya perjanjian oleh satu orang atau lebih, dimana *principal* mengikat pihak lain (agen) untuk melaksanakan kegiatan demi kepentingan *principal*. Agen juga diberikan

kewenangan oleh *principal* dalam hal pengambilan keputusan demi terpenuhinya kepentingan *principal* tersebut. Namun, hubungan ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Ketidakselarasan ini tercipta karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* yang menginginkan tingkat pengembalian atas investasi yang telah dilakukan (*return on investment*), sedangkan pihak manajemen ingin memaksimalkan kompensasi yang bisa diperoleh dari perusahaan sesuai dengan kontrak.

Dalam lingkup organisasi, teori keagenan menjelaskan munculnya ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) dan konflik kepentingan. Asimetri informasi adalah kondisi dimana pihak *principal* tidak memperoleh informasi yang sama banyak dengan informasi yang dimiliki oleh pihak agen. Kedua hal tersebut akan menimbulkan konflik yang disebut dengan *agency problem*. Dalam *agency problem*, dikenal adanya *conflict of interest* yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Konflik ini membutuhkan *agency cost* untuk mengatasinya. *Agency cost* digunakan sebagai mekanisme monitoring dan bonding terhadap perilaku agent.

Namun, keberadaan *agency cost* yang terlalu tinggi akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa maksimal dalam efisiensi anggaran. Sehingga perlu dibentuk suatu mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang ada. Contoh dari mekanisme-mekanisme tersebut adalah pemberian insentif dan kompensasi yang menarik bagi manajemen yang memungkinkan berkurangnya konflik dan pemberlakuan peraturan-peraturan oleh dewan komisaris (Fama and Jensen, 1983).

Teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman dalam praktik pengungkapan risiko. Manajer sebagai pihak agen, memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat, dibandingkan dengan *stakeholder*. Informasi tersebut mencakup seluruh kondisi perusahaan, termasuk kondisi-kondisi yang mungkin akan dihadapi perusahaan di masa datang. Pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya memerlukan informasi-informasi tersebut untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Apabila terdapat asimetri informasi antara pihak agen dan *principal*, maka keputusan yang diambil bisa berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak. Manajer seharusnya menjamin ketersediaan informasi yang relevan dan lengkap mengenai risiko yang dihadapi perusahaan, salah satunya dengan menggunakan mekanisme pengungkapan. Kesimpulannya, pengungkapan risiko yang baik akan mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pihak agen dan *principal*.

2.1.2 Risiko

Terdapat beberapa definisi tentang resiko. Risiko menurut ICAEW adalah suatu kejadian yang tidak pasti, yang apabila terjadi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Linsley and Shrives (2005) dan Amran *et al.* (2009) mengelompokkan risiko ke dalam 6 garis besar, yaitu *Financial Risk, Operation Risk, Empowerment Risk, Information Processing and Technology Risk, Integrity Risk* dan *Strategic Risk*. Risiko biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang negatif, seperti kehilangan profit atau kemungkinan mengalami kerugian.

Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Risiko pasti akan melekat pada seluruh kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami risiko yang mungkin akan dihadapi dalam perjalanan bisnis. Apabila perusahaan tidak memahami risiko yang dihadapi, maka keputusan bisnis yang diambil justru akan menghambat pencapaian tujuan. Pemahaman yang baik akan membantu pihak *agent* maupun *principal* dalam pengambilan keputusan bisnis untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

Setiap perusahaan memiliki resiko yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu pengelolaan resiko yang sesuai dengan risiko yang dihadapi perusahaan. Pengelolaan ini bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan lancar. Pengelolaan resiko yang baik dapat membantu perusahaan mempersiapkan strategi. Untuk melaksanakan pengelolaan risiko ini, perusahaan dapat menggunakan manajemen resiko.

2.1.3 Manajemen Risiko

Risiko sebagai bagian yang melekat pada aktivitas bisnis, memaksa perusahaan agar selalu siap untuk menghadapinya. Dalam usaha mengantisipasi risiko tersebut, perusahaan berinisiatif melakukan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yang baik dapat menghindarkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan membuat suatu manajemen risiko dalam perusahaan.

Manajemen risiko adalah suatu proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur dan mengelola risiko secara lebih transparan (Pratika, 2011). Proses ini bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko (Hanafi, 2009). Dalam melakukan manajemen risiko, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Hanafi (2009) membagi proses ini ke dalam 3 tahap berikut :

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi.

2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik.

3. Pengelolaan Risiko

Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar.

Apabila dilaksanakan dengan baik, manajemen risiko dapat menciptakan inovasi, kinerja dan keunggulan kompetitif (Liu, 2006). Perusahaan yang menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, dapat menjadi dasar pertimbangan *stakeholder* untuk mengambil keputusan secara tepat, dengan ketentuan bahwa praktik manajemen risiko dan hasilnya dikomunikasikan dengan baik.

2.1.4 Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko adalah salah satu bentuk *disclosure* yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai risiko-risiko yang dialami dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam satu periode pelaporan akuntansi. Perusahaan sebaiknya memberikan informasi mengenai risiko, dan mengungkapkannya secara jelas dan akurat. Pengungkapan risiko dapat dikatakan baik apabila pengguna merasa diberikan informasi yang lengkap, jelas dan akurat.

Perusahaan biasanya mengungkapkan risiko perusahaan melalui beberapa media. Beberapa perusahaan mencantumkan risiko dalam *annual report*, yaitu dalam bagian manajemen risiko, maupun tersebar di bagian lain seperti dalam pernyataan Direktur Utama. Selain *annual report*, terdapat pula perusahaan yang mengungkapkan risiko perusahaan di dalam Laporan Keuangan. Pada bagian

Catatan Atas Laporan Keuangan, perusahaan seringkali mengungkapkan mengenai risiko yang dihadapi perusahaan.

Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999 dalam Abraham dan Cox, 2007). Pengungkapan risiko ini berguna untuk perusahaan dan juga *stakeholder* dalam memberikan prediksi keadaan perusahaan untuk masa mendatang dan juga melengkapi informasi dalam realitanya menjalani operasional dengan segala ancaman dan hambatannya. Selain itu, pengungkapan risiko bermanfaat bagi *user-nya* (*principal* dan *agent*) untuk mengambil keputusan, terutama dalam hal investasi. Manfaat lain dari pengungkapan risiko adalah untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor serta untuk mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan (Bujaki *et al.*, 1999 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007).

Pengungkapan risiko sendiri merupakan salah satu praktik *Good Corporate Governance*. Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* menyebutkan bahwa perlunya perusahaan untuk mengungkap informasi salah satunya adalah informasi manajemen risiko. Dalam pedoman ini juga diatur tentang wewenang struktur perusahaan dalam menangani risiko baik antisipasi, penanggulangan dan pengendaliannya.

Institusi-institusi terkait menerbitkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar praktik pengungkapan risiko di Indonesia. Sebagai contoh, bagi perusahaan

yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, Bapepam menetapkan regulasi yang mengatur tentang pengungkapan yang harus dilakukan oleh emiten. Seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa perusahaan harus menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya: risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah.

Bagi perusahaan yang berstatus BUMN, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN membuat suatu peraturan yang memberikan pedoman bagi perusahaan BUMN dalam melakukan praktik pengungkapan. Pedoman tersebut berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002. Dalam pasal 22 ayat 2 (b) bahwa Dewan Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal dalam hal pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan. Selain itu dalam pasal 28 ayat 2 (h) juga disebutkan bahwa perusahaan BUMN harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham/pemilik modal, kreditur, dan *stakeholders*, salah satunya faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko.

Selain peraturan-peraturan di atas, pengungkapan resiko juga diatur dalam ED PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Di dalam PSAK 60 disebutkan bahwa informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan harus diungkapkan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan untuk kuantitatif entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

2.1.5 Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko

2.1.5.1 Tingkat Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko merupakan salah satu cara bagi agent untuk memberikan informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan kepada *stakeholder*. Namun saat ini belum ada indikator khusus yang menunjukkan kualitas dari pengungkapan risiko. Untuk itu perusahaan dirasa perlu untuk melakukan pengungkapan risiko yang sebaik-baiknya. Ketika perusahaan melakukan pengungkapan dengan baik, maka perusahaan telah melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*.

Setiap perusahaan memiliki karakteristik pengungkapan risiko yang berbeda-beda. Tidak ada ketentuan baku yang mengatur format pengungkapan risiko yang harus ditaati perusahaan. Sehingga setiap perusahaan

mengungkapkannya dengan format masing-masing. Namun semakin baik pengungkapan risiko dilakukan, maka semakin mudah pula *stakeholder* mendapatkan informasi.

2.1.5.2 Struktur Kepemilikan

Dalam struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, biasanya *agency cost* lebih rendah dibandingkan dengan struktur kepemilikan yang lebih menyebar (Jensen dan Meckling, 1976). Apabila jumlah pemegang saham yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol manajemen lebih banyak, maka intervensi aktif tersebut dapat mengurangi *agency cost*. Semakin tinggi tingkat pengawasan akan membuat pengungkapan risiko tidak terlalu dibutuhkan (Oliviera *et al.*, 2011).

Namun dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih menyebar, akan mudah menimbulkan *agency problem*. Pemilik saham minoritas akan kesulitan melakukan pengawasan aktif, sehingga perusahaan perlu untuk mengungkapkan dengan porsi yang besar agar seluruh pemilik dapat memperoleh informasi yang cukup.

Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan diukur dengan menghitung jumlah pemegang saham yang memiliki lebih dari 10% saham.

2.1.5.3 Dewan Komisaris Independen

Secara tidak langsung, dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Direktur eksekutif

perusahaan. Namun hal tersebut akan menimbulkan tingkat risiko yang lebih tinggi, karena dewan komisaris independen akan bertindak sebagai pihak eksternal dari perusahaan dan biasanya hanya memiliki sedikit keterlibatan dalam pelaksanaan manajemen perusahaan (Lim *et al.*, 2007 dalam Oliviera *et al.*, 2011).

Perusahaan dirasa perlu untuk memberikan informasi mengenai proporsi dewan komisaris independen. Karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat resiko reputasi pribadi mereka. Sehingga diharapkan perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi akan melakukan pengungkapan risiko yang lebih tinggi. (Lopes dan Rodrigues, 2007 dalam Oliviera *et al.*, 2011)

Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen diukur dengan cara menghitung proporsi dewan komisaris independen di dalam dewan perusahaan.

2.1.5.4 Komite Audit Independen

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Dalam perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar, kompleks dan beragam akan menimbulkan kesulitan bagi dewan direksi untuk melaksanakan pengawasan dan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, sering terjadi pendelegasian wewenang tanggung jawab dalam hal pengelolaan kepada karyawan (Oliviera *et al.*, 2011). Hal ini akan mendorong dewan direksi untuk

meminta komite audit melakukan mekanisme pengawasan dalam organisasi, untuk mengawasi kinerja karyawan.

Komite audit akan bekerja secara efektif apabila independensinya tetap terjaga. Demi mewujudkannya komite yang efektif, maka harus independen dan memiliki dewan komisaris independen di dalamnya (Turley dan Zaman, 2004 dalam Oliviera *et al.*, 2011). Perusahaan dengan proporsi komite audit independen yang lebih tinggi akan mengungkapkan risiko lebih luas untuk mengurangi biaya agensi.

Dalam penelitian ini, komite audit independen diukur dengan cara menghitung proporsi anggota komite audit yang independen di dalam komite audit.

2.1.5.5 Kualitas Auditor Eksternal

Kualitas auditor eksternal merupakan hal penting dalam melaksanakan proses audit. Dengan memilih auditor eksternal yang baik, tentu dewan komisaris independen berharap independensi dan profesionalisme dalam pemeriksaan laporan keuangan akan selalu terjaga. Kualitas auditor yang baik juga akan membuat para *stakeholder* percaya mengenai kevalidan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Informasi yang diungkap auditor juga dapat memberikan pertimbangan mengenai keputusan yang akan diambil oleh *stakeholder*.

Perusahaan dengan *agency cost* yang tinggi, akan cenderung menggunakan KAP dengan kualitas yang lebih baik (Jensen and Meckling, 1976). Hal itu dikarenakan Kantor Akuntan Publik yang lebih besar dan terkenal cenderung

mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih luas untuk mempertahankan reputasi KAP dan juga menghindari biaya reputasi yang akan dikenakan (Chalmers dan Godfrey, 2004 dalam Oliviera *et al.*, 2011). Dan pengungkapan risiko merupakan salah satu pengungkapan yang harus dilakukan.

Kualitas auditor eksternal sendiri dapat ditunjukkan dalam suatu kategori. Istilah Big 4 sudah dikenal sejak bertahun-tahun silam. Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam kategori Big 4 dipercaya memiliki reputasi yang terbaik, baik itu di Indonesia maupun Internasional.

2.1.5.6 Leverage

Leverage merupakan suatu instrumen untuk mengukur seberapa banyak penggunaan hutang sebagai pembiayaan investasi. Semakin besar jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai investasi, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan kepada kreditor. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung lebih spekulatif dan berisiko. Utang memiliki kekuatan yang lebih besar atas struktur keuangan perusahaan tersebut. Dari perspektif teori keagenan, kreditor dari perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki insentif yang kuat mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Amran *et al.*, 2009)

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan debt to asset ratio. Semakin tinggi *Debt to Asset Ratio*, berarti semakin tinggi pula penggunaan hutang sebagai biaya investasi perusahaan. Apabila rasio ini tinggi, maka perusahaan menghadapi risiko likuiditas yang juga tinggi (Taures, 2011).

2.1.5.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan (Taures, 2011). Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya ukuran perusahaan. Seperti total penjualan, total aset, jumlah karyawan dan nilai kapitalisasi pasar. Semakin besar instrumen tersebut, semakin besar pula ukuran perusahaan.

Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Proksi tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Elzahar dan Hussainey (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan secara positif dengan tingkat pengungkapan risiko.

2.1.5.8 Jenis Industri

Jenis industri perusahaan berkaitan dengan sensitivitas kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini, perusahaan digolongkan ke dalam dua jenis sensitivitas lingkungan yaitu, *high profile industry* dan *low profile industry*. Perusahaan yang termasuk dalam *high profile industry* adalah perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi pada lingkungan. Sedangkan perusahaan *low profile industry* adalah perusahaan yang memiliki aktivitas operasi yang lebih sederhana dan memiliki sensitivitas terhadap lingkungan yang lebih rendah.

Perusahaan *high profile industry* misalnya perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan, kimia, perhutanan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, transportasi dan

pariwisata (Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Taures, 2011). Sedangkan perusahaan yang termasuk perusahaan *low profile industry* adalah perusahaan yang bergerak di bidang bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok alat-alat kesehatan, properti, perusahaan pengecer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan risiko telah dilakukan di berbagai negara. Linsley dan Shrivies (2006) melakukan penelitian dengan judul *Risk reporting: A study of risk disclosure in the annual reports of UK companies*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko di perusahaan-perusahaan UK. Selain itu *BiE Index* dan *the EcoValue'21TM Rating Model* mewakili tingkat risiko perusahaan yang berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko.

Abraham dan Cox (2007) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan pengungkapan risiko dalam laporan tahunan 100 perusahaan nonkeuangan di Bursa Inggris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abraham dan Cox (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh *long-term institutions* secara negatif berhubungan dengan pengungkapan risiko, namun kepemilikan yang dimiliki oleh *shortterm institutions* berhubungan positif dengan pengungkapan risiko. Selain itu ukuran dewan komisaris dan jumlah komisaris independen berhubungan positif dengan pengungkapan risiko.

Oliviera *et al.* (2011) meneliti pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan non keuangan di Portugal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen, jenis auditor eksternal, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan dan sensitivitas lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel (X) dan (Y)	Statistic Tools	Hasil
Linsley dan Shrives (2006)	Dependen (Y): <ul style="list-style-type: none"> • Luas Pengungkapan Risiko Perusahaan • Tingkat Risiko Perusahaan Independen (X) : <ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dewan komisaris • Kepemilikan institusional • <i>Dual Listing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat statistik : <i>Mann-Whitney U test</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. • Hanya <i>BiE Index</i> dan <i>the EcoValue'21TM Rating Model</i> yang mewakili tingkat risiko perusahaan yang berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko
Abraham dan Cox (2007)	Dependen (Y) : <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan Risiko Independen (X) :	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Statistik : <i>Multiple Regression</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan yang dimiliki oleh <i>long-term institutions</i> secara negatif berhubungan dengan

	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan insitusional • <i>Governance</i> • <i>US listing characteristics</i> 	•	<p>pengungkapan risiko, namun kepemilikan yang dimiliki oleh <i>shortterm institutions</i> berhubungan positif dengan pengungkapan risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dewan komisaris dan jumlah komisaris independen berhubungan positif dengan pengungkapan risiko.
Oliveira <i>et al.</i> (2011)	<p>Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan Risiko <p>Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Kepemilikan • Komisaris Independen • Komite Audit Independen • Jenis Auditor Eksternal • Tingkat <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan • Sensitivitas Lingkungan 	• Alat Statistik : <i>Ordinary least squares</i> (OLS) multiple regressions	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan merupakan <i>generic, qualitative dan backward-looking</i>. Variabel yang signifikan dengan pengungkapan risiko adalah komisaris independen, jenis auditor eksternal, tingkat <i>leverage</i>, ukuran perusahaan dan sensitivitas lingkungan

Sumber : Jurnal Penelitian

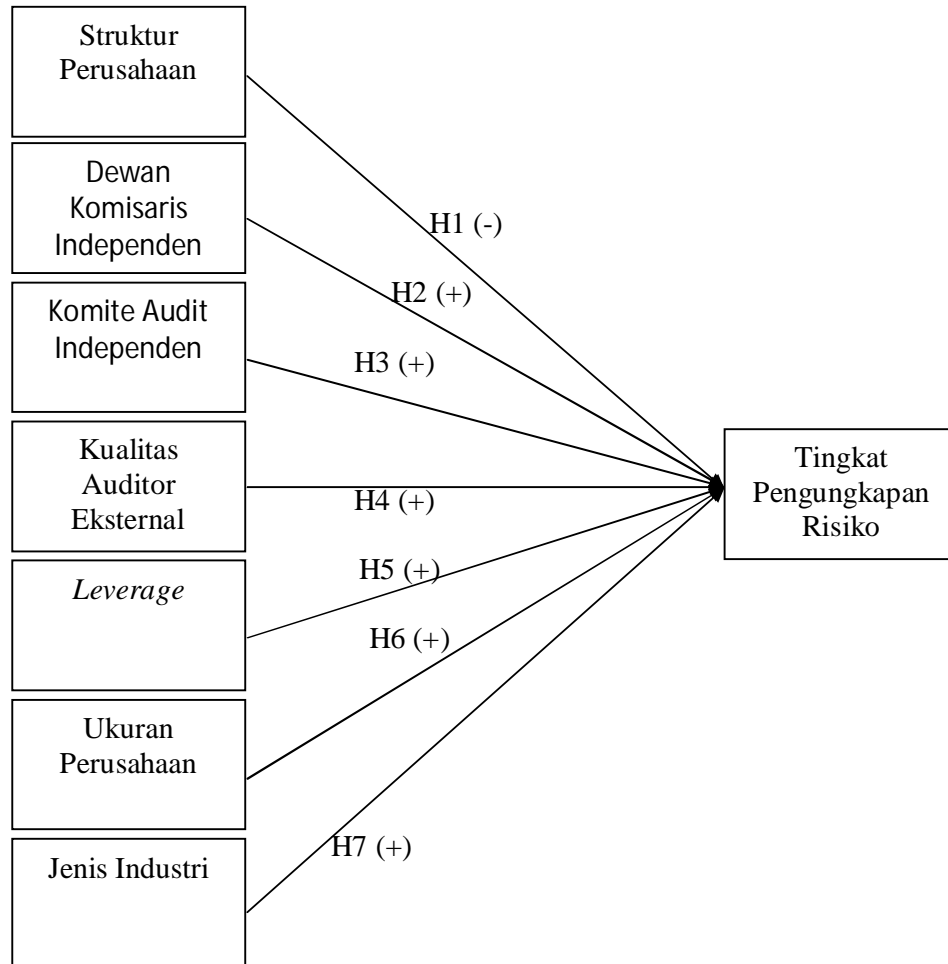
2.3 Kerangka Pemikiran

Pengungkapan resiko yang dilakukan perusahaan berbeda-beda. Selain karena tidak ada peraturan baku yang memuat tentang format pengungkapan resiko, juga karena karakteristik perusahaan yang berbeda-beda. Resiko yang dihadapi setiap perusahaan sesuai dengan karakteristik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, pengungkapan yang dilakukan pun akan sesuai dengan resiko yang dihadapi. Karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko perusahaan antara lain, struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit independen, kualitas auditor eksternal, *leverage*, ukuran perusahaan dan jenis industri.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori yang mengatakan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko yang dilakukan oleh perusahaan dengan uji hierarkis. Penelitian ini menggunakan indikator formatif untuk. Pengukuran variabel karakteristik perusahaan dilakukan dengan membentuk satu indikator untuk tiap satu konstruk variabel.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bagian **2.1.4** , maka diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Struktur perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko. Dalam struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, biasanya *agency cost* lebih rendah dibandingkan dengan struktur kepemilikan yang lebih menyebar (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin menyebar struktur kepemilikan perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan risiko yang dibutuhkan. Selanjutnya, adalah dewan komisaris independen. Apabila proporsi dewan komisaris independen dalam suatu dewan

tinggi, maka pengungkapan risiko juga lebih tinggi. Dewan komisaris independen bertindak sebagai pihak eksternal yang membutuhkan informasi lebih karena pihak internal memperoleh informasi yang lebih banyak karena ikut serta secara aktif dalam proses bisnis. Yang ketiga adalah proporsi komite audit independen dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsinya, maka semakin tinggi pula pengungkapan risiko yang diharapkan. Karakteristik perusahaan berikutnya adalah kualitas auditor eksternal. Perusahaan dengan *agency cost* yang tinggi, akan cenderung menggunakan KAP dengan kualitas yang lebih baik (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga, perusahaan yang menggunakan KAP Big4 diharapkan akan mengungkapkan risiko lebih luas. Selanjutnya, karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko adalah *leverage*. Semakin besar penggunaan hutang dalam biaya investasi, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap kreditor. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan risiko untuk memberikan informasi kepada kreditor. Karakteristik yang keenam adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi pula pengungkapan yang dilakukan. Yang terakhir adalah jenis industri perusahaan. Perusahaan dengan kategori *high profile* akan cenderung mengungkapkan risiko secara lebih luas, karena risiko yang dihadapi lebih besar dibanding perusahaan dengan kategori *low profile*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan antara Struktur Kepemilikan dan Tingkat Pengungkapan Risiko

Apabila jumlah pemegang saham yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol manajemen lebih banyak, maka intervensi aktif tersebut dapat mengurangi *agency cost*. Semakin tinggi tingkat pengawasan akan membuat pengungkapan risiko tidak terlalu dibutuhkan (Oliviera *et al.*, 2011). Untuk itu dalam struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, biasanya *agency cost* lebih rendah dibandingkan dengan struktur kepemilikan yang lebih menyebar (Jensen dan Meckling, 1976).

Namun dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih menyebar, akan mudah menimbulkan *agency problem*. Pemilik saham minoritas akan kesulitan melakukan pengawasan aktif, sehingga perusahaan perlu untuk mengungkapkan dengan porsi yang besar agar seluruh pemilik dapat memperoleh informasi yang cukup. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut,

H1 : Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko

2.4.2 Hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Tingkat Pengungkapan Risiko

Secara tidak langsung, dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Direktur eksekutif

perusahaan. Namun hal tersebut akan menimbulkan tingkat risiko yang lebih tinggi, karena dewan komisaris independen akan bertindak sebagai pihak eksternal dari perusahaan dan biasanya hanya memiliki sedikit keterlibatan dalam pelaksanaan manajemen perusahaan.

Perusahaan dirasa perlu untuk memberikan informasi mengenai proporsi dewan komisaris independen. Karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat resiko reputasi pribadi mereka. Dengan demikian, tingkat pengungkapan yang lebih tinggi diharapkan dari perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi (Lopes dan Rodrigues, 2007 dalam Oliviera *et al.*, 2011). Sehingga untuk mengurangi biaya agensi, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lebih luas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut,

H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko

2.4.3 Hubungan antara Komite Audit Independen dan Tingkat Pengungkapan Risiko

Dalam perusahaan yang memiliki ukuran besar kompleks dan beragam, dewan direksi akan merasa kesulitan untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko yang efektif. Oleh karena itu, seringkali dewan komisaris

mendelegasikan tanggung jawab ini kepada bawahannya. Untuk mengawasi kinerja karyawan, dewan direksi memerlukan dukungan dari mekanisme pengawasan dalam organisasi, salah satunya adalah komite audit. Agar komite audit menjadi efektif, maka harus independen. Perusahaan dengan proporsi komite audit independen yang lebih tinggi akan mengungkapkan risiko lebih luas untuk mengurangi biaya agensi Oliviera *et al.* (2011). Dari penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut,

H3 : Komite audit independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko.

2.4.4 Hubungan antara Kualitas Auditor Eksternal dan Tingkat Pengungkapan Risiko

Kualitas auditor eksternal merupakan hal penting dalam melaksanakan proses audit. Dengan memilih auditor eksternal yang baik, tentu dewan komisaris independen berharap independensi dan profesionalisme dalam pemeriksaan laporan keuangan akan selalu terjaga. Kualitas auditor eksternal sendiri dapat ditunjukkan dalam suatu kategori. Istilah Big 4 sudah dikenal sejak bertahun-tahun silam. Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam kategori Big 4 dipercaya memiliki reputasi yang terbaik, baik itu di Indonesia maupun Internasional

Perusahaan dengan *agency cost* yang tinggi, akan cenderung menggunakan KAP dengan kualitas yang lebih baik (Jensen and Meckling, 1976). Kantor Akuntan Publik yang lebih besar dan terkenal cenderung mendorong perusahaan

untuk mengungkapkan lebih luas untuk mempertahankan reputasi KAP dan juga menghindari biaya reputasi yang akan dikenakan (Chalmers dan Godfrey, 2004 dalam Oliviera *et al.*, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut,

H4 : Perikatan dengan KAP Big4 berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko.

2.4.5 Hubungan antara *Leverage* dan Tingkat Pengungkapan Risiko

Leverage adalah suatu cara untuk mengukur besarnya penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Semakin besar *leverage*, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan kepada kreditor. Perusahaan dengan tingkat hutang yang lebih tinggi cenderung spekulatif dan berisiko. Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan tingkat ketergantungan terhadap kreditor yang tinggi memiliki insentif yang kuat kepada manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih luas (Amran *et al.*, 2009). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut,

H5 : Terdapat pengaruh positif antara *leverage* dengan tingkat pengungkapan risiko

2.4.6 Hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Tingkat Pengungkapan Risiko

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan (Taurus, 2011). Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan

untuk mengukur besarnya ukuran perusahaan. Seperti total penjualan, total aset, jumlah karyawan dan nilai kapitalisasi pasar. Semakin besar instrumen tersebut, semakin besar pula ukuran perusahaan.

Perusahaan dengan ukuran lebih besar akan lebih terlihat dan menarik perhatian dari para *stakeholder*. Perusahaan tersebut akan menganggap bahwa pengungkapan risiko sebagai cara untuk meningkatkan reputasi perusahaan melalui sistematika pengungkapan. Hal ini dilakukan dengan dasar tingkat visibilitas yang lebih besar oleh publik menyiratkan pengawasan yang lebih ketat dari pemangku kepentingan (Amran *et al.*, 2009). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut,

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko.

2.4.7 Hubungan antara Jenis Industri dan Tingkat Pengungkapan Risiko

Jenis industri perusahaan berkaitan dengan tingkat sensitivitas kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Industri manufaktur dan industri yang sensitif terhadap politik dan lingkungan (seperti minyak, gas atau teknologi tinggi) cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih luas (Hannifa dan Cooke, 2002 dalam Oliviera *et al.*, 2011). Terdapat dua kategori golongan jenis industri, yaitu *high profile* dan *low profile industry*. Perusahaan *high profile industry* misalnya perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan, kimia, perhutanan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik),

engineering, kesehatan, transportasi dan pariwisata (Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Taures, 2011). Sedangkan perusahaan yang termasuk perusahaan *low profile industry* adalah perusahaan yang bergerak di bidang bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok alat-alat kesehatan, properti, perusahaan pengecer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.

Tingkat sensitivitas lingkungan dalam perusahaan memiliki tekanan sosial yang lebih besar dalam hal pengawasan *stakeholder*. Manajemen dari perusahaan yang termasuk *high profile industry* memiliki insentif untuk mengungkapkan risiko lebih luas untuk mempengaruhi *stakeholder* dalam hal persepsi reputasi perusahaan dan skill manajemen (Oliviera *et al.*, 2011). Hal ini dilakukan agar *stakeholder* tetap memberikan kepercayaan terhadap perusahaan. Meski kegiatan bisnisnya sangat sensitif terhadap lingkungan, perusahaan dapat menunjukkan kemampuan pengelolaannya, sehingga efek kegiatan bisnis terhadap lingkungan dapat dikelola dengan baik, dan reputasi perusahaan juga terjaga melalui pengungkapan ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut,

H7 : Tingkat sensitivitas lingkungan yang tinggi berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan risiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko adalah pemberian informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan oleh agent kepada *stakeholder*. Media yang digunakan untuk melakukan pengungkapan ini salah satunya melalui *annual report*. Pengungkapan yang baik adalah ketika *stakeholder* merasa diberi informasi yang memadai dari pengungkapan tersebut.

Dalam penelitian ini, tingkat pengungkapan risiko dihitung dengan menggunakan cara *content analysis*. Metode *content analysis* sering digunakan dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Lajili dan Zeghal , 2005 ;Linsley dan Shrives, 2006 ; Abraham and Cox, 2007 ; Oliviera *et al.*, 2011). Metode ini merupakan cara yang paling tepat dalam melakukan penelitian ini karena efektif dalam mengkategorikan data kualitatif yang besar dan terutama mengandung pengungkapan risiko (Lajili dan Zeghal, 2005).

Pengukuran tingkat pengungkapan risiko dilakukan dengan menghitung jumlah kalimat yang memberikan informasi mengenai risiko dalam laporan tahunan. Penggunaan kalimat sebagai dasar pengukuran dan penghitungan memiliki kelebihan yakni menyediakan data yang lengkap, handal, dan bermakna untuk analisis lebih lanjut (Milne dan Adler, 1999 dalam Linsley dan Shrives,

2006). Item-item dari pengungkapan risiko yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Linsley dan Shrivess (2005) dan Amran *et al.* (2009), yaitu :

Tabel 3.1
Item Pengungkapan Risiko

<i>Financial Risk</i>	<i>Interest rate</i> <i>Exchange rate</i> <i>Commodity</i> <i>Liquidity</i> <i>Credit</i>
<i>Operation Risk</i>	<i>Customer satisfaction</i> <i>Product Development</i> <i>Efficiency and performance</i> <i>Sourcing</i> <i>Stock obsolescence and shrinkage</i> <i>Product and service failure</i> <i>Environmental</i> <i>Health and safety</i> <i>Brand name erosion</i>
<i>Empowerment Risk</i>	<i>Leadership and management</i> <i>Outsourcing</i> <i>Performance incentives</i> <i>Change readiness</i> <i>Communications</i>
<i>Information processing and technology risk</i>	<i>Integrity</i> <i>Access</i> <i>Availability</i> <i>Infrastructure</i>
<i>Integrity Risk</i>	<i>Risk-management policy</i> <i>Management and employee fraud</i>

	<i>Illegal acts</i> <i>Reputation</i>
<i>Strategic Risk</i>	<i>Enviromental scan</i> <i>Industry</i> <i>Business portfolio</i> <i>Competitors</i> <i>Pricing</i> <i>Valuation</i> <i>Planning</i> <i>Life cycle</i> <i>Performance measurment</i> <i>Regulatory</i> <i>Sovereign and political</i>

Sumber : Linsley dan Shrives (2006)

Batasan ketentuan pengungkapan risiko yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Linsley dan Shrives (2006), yaitu:

1. Kalimat yang dianggap sebagai pengungkapan risiko adalah jika pembaca diberi informasi tentang kesempatan atau prospek, atau tentang risiko, bahaya, kerugian, dan hambatan, yang telah atau akan berdampak pada perusahaan di masa depan,
2. Definisi risiko tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebagai risiko baik, risiko buruk dan ketidakpastian,
3. Pengungkapan harus secara eksplisit dinyatakan, tidak dapat ditandakan,
4. Pengungkapan yang diulangi akan dicatat sebagai kalimat pengungkapan risiko setiap kali hal tersebut didiskusikan,

5. Jika sebuah pengungkapan terlalu samar untuk diidentifikasi, maka tidak akan dicatat sebagai pengungkapan risiko.

$$\text{Tingkat Pengungkapan Risiko} = \frac{\Sigma \text{Item Pengungkapan Risiko yang dilakukan Perusahaan}}{\Sigma \text{Total item Pengungkapan Risiko}} \dots (3.1)$$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Struktur Kepemilikan

Informasi mengenai struktur kepemilikan suatu perusahaan biasanya diungkap melalui *annual report*. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah pemegang saham yang memiliki lebih dari 10% saham.

3.1.2.2 Dewan Komisaris Independen

Ukuran dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proporsi jumlah anggota dewan komisaris yang independen dibanding seluruh jumlah anggota suatu dewan komisaris di perusahaan.

3.1.2.3 Komite Audit Independen

Dalam penelitian ini, komite audit independen diukur dengan cara menghitung proporsi jumlah anggota komite audit yang independen dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota komite audit.

3.1.2.4 Kualitas Auditor Eksternal

Kualitas auditor eksternal diukur dengan menggunakan variabel dummy. Untuk auditor eksternal yang termasuk kategori Big4 maka akan diberi kode 1. Sedangkan selain Big4 diberi kode 0.

3.1.2.5 Leverage

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *debt to asset ratio*. Penggunaan *debt to asset ratio* telah banyak digunakan sebagai proksi *leverage* di penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Amran *et al.*, 2009; Oliviera *et al.*, 2011). Debt to asset ratio adalah proporsi dari jumlah hutang dibandingkan dengan jumlah aset perusahaan.

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Kewajiban}{Total\ Aset\ Perusahaan} \quad \dots (3.2)$$

3.1.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah total aset. Metode ini telah dilakukan oleh Elzahar dan Hussainey (2012) untuk meneliti tingkat pengungkapan risiko pada perusahaan di UK.

$$Size = TA \quad \dots (3.3)$$

3.1.2.7 Jenis Industri

Jenis industri dalam penelitian ini digolongkan pada dua kategori, yaitu *high profile industry* dan *low profile industry*. Perusahaan *high profile industry* misalnya perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan, kimia,

perhutanan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, transportasi dan pariwisata (Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Taures, 2011). Sedangkan perusahaan yang termasuk perusahaan *low profile industry* adalah perusahaan yang bergerak di bidang bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok alat-alat kesehatan, properti, perusahaan pengecer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga. Penggolongan jenis industri menggunakan variabel dummy, untuk *high profile industry* diberi kode 1, sedangkan *low profile industry* diberi kode 0.

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran Data
Dependen (X)	Tingkat Pengungkapan Risiko (Oliviera <i>et al.</i> , 2011)	$\frac{\Sigma \text{Item Pengungkapan Risiko yang dilakukan Perusahaan}}{\Sigma \text{Total item Pengungkapan Risiko}}$	Skala Ordinal
Y1	Struktur Kepemilikan Perusahaan (Oliviera <i>et al.</i> , 2011)	Total prosentase kepemilikan di atas 10%	Skala Rasio
Y2	Dewan Komisaris Independen (Oliviera <i>et al.</i> , 2011)	Jumlah anggota Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris	Skala Rasio
Y3	Komite Audit Independen (Oliviera <i>et al.</i> , 2011)	Jumlah anggota Independen dalam komite audit	Skala Rasio
Y4	Kualitas Auditor Eksternal (Oliviera <i>et al.</i> ,	Big4 = 1 ; nonBig4 = 0	Skala Nominal

	2011)		
Y5	<i>Leverage</i> (Oliviera <i>et al.</i> , 2011)	Debt to Asset Ratio	Skala Rasio
Y6	Ukuran Perusahaan (Oliviera <i>et al.</i> , 2011)	Total Asset	Skala Rasio
Y7	Jenis Industri (Oliviera <i>et al.</i> , 2011)	<i>High Profile Industry</i> = 1 ; <i>Low Profile Industry</i> = 0	Skala Nominal

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011, kecuali sektor keuangan. Dari 449 perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, terdapat 72 perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan sehingga dikeluarkan dari populasi. Sektor keuangan tidak digunakan karena memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan sektor non-keuangan (Alsaeed, 2006). Selain itu, sektor keuangan khususnya perbankan telah diwajibkan untuk mengungkapkan risiko secara lebih ketat dan diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum. Berbeda dengan sektor non-keuangan yang tidak diatur secara khusus dalam pengungkapan risiko yang dilakukan.

Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang diambil adalah perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan termasuk dalam sektor non-keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan tahunan tahun 2011. Data mengenai tingkat pengungkapan risiko, jenis industri, komite audit independen, dewan komisaris independen, struktur kepemilikan dan kualitas auditor eksternal diambil pada bagian naratif dalam laporan tahunan. Sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan diambil dalam bagian kuantitatif laporan tahunan seperti laporan keuangan. Data-data tersebut diperoleh dari: situs BEI yaitu www.idx.co.id dan Pojok BEI UNDIP

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2009). Standar Deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik, sedangkan variabel non-metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel

3.5.2 Partial Least Square

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS). Dalam hal ini, Karakteristik perusahaan dan tingkat pengungkapan risiko diperlakukan sebagai variabel laten dengan masing-masing indikatornya.

PLS merupakan salah satu metode untuk melaksanakan model *Structural Equation Modelling* (SEM). Model PLS ini digunakan pada saat dasar teori perancangan model lemah dan indikator pengukuran tidak memenuhi model pengukuran yang ideal. PLS dapat digunakan dengan jumlah sampel yang tidak besar dan dapat diterapkan pada semua skala data (Ghozali, 2006).

PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian preposisi. PLS juga merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk tujuan prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana indikator bersifat formatif, atau ketika penelitian ini masih tidak pasti karena variabel seharusnya termasuk pada sebuah model atau berhubungan diantara variabel dengan model atau berhubungan diantara variabel dengan model *miss-specified* akan menghasilkan perkiraan *inferior varians* sesuai yang dijelaskan PLS. *Missing variables* dan *miss-specification* lain hanya memiliki sedikit efek estimasi yang dibuat oleh PLS (Ghozali, 2006).

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (*loading*). Ketiga,

berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (Ghozali, 2006). Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari 2 model, yaitu *inner model* dan *outer model*.

3.5.1 Inner Model

Inner model (*inner relation, structural model dan substantive theory*) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-GeisserQ-square test* untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantis (Ghozali, 2006).

3.5.2 Outer Model

Dalam penelitian ini, konstruk penelitian disusun dengan indikator formatif. Konstruk dengan indikator formatif tidak dapat dianalisis dengan melihat *convergent validity* dan *composite reliability*. Oleh karena, konstruk formatif pada dasarnya merupakan hubungan regresi dari indikator ke konstruk. Cara menilainya adalah dengan melihat koefisien regresi dan signifikansi dari koefisien regresi tersebut melalui tabel *outer weight* (Ghozali, 2006).

Gambar 3.1
Model Konstruksi PLS

